

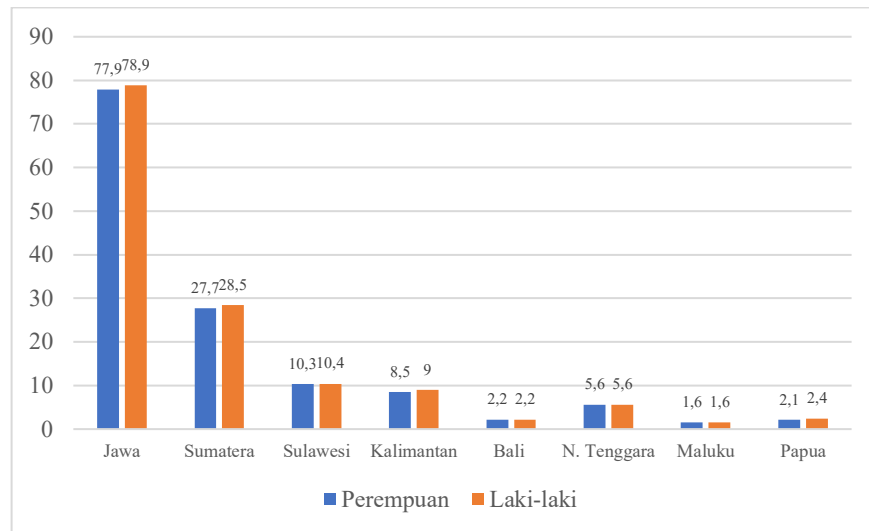
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional memiliki kaitan erat dengan masalah kependudukan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi adalah menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Bonnerri et al., 2018). Sebagai faktor produksi utama, tenaga kerja memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengarahkan sistem ekonomi, mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, di mana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, sekaligus penerima manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri. Secara potensial, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 17.374 pulau dan dikenal sebagai negara kepulauan di dunia. Saat ini, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja yang dimiliki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di setiap pulau yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah kembali)

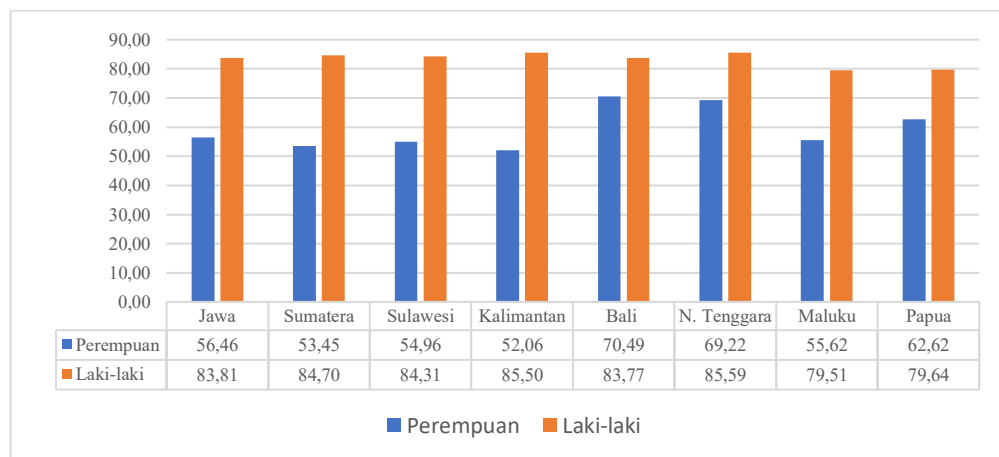
Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin antar Pulau di Indonesia Tahun 2024 (juta jiwa)

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin antar pulau yang ada di Indonesia. Dari data tersebut, pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan pulau-pulau lainnya. Oleh karena itu, ketiga pulau tersebut secara langsung memiliki potensi angkatan kerja yang besar, karena jumlah angkatan kerja sangat bergantung pada struktur penduduknya. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS, 2017), sebab ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, maka jumlah angkatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja akan meningkat (Disnaker, 2019).

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 156,8 juta jiwa, terdiri dari 77,9 juta jiwa perempuan dan 78,9 juta jiwa laki-laki. Pulau ini juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, yaitu 22.961 jiwa per kilometer persegi, dengan luas wilayah 128.297 km². Sementara itu, Pulau Sumatera memiliki 56,2 juta jiwa penduduk, dengan rincian 27,7 juta jiwa perempuan dan 28,5 juta

jiwa laki-laki. Kepadatan penduduk di Sumatera mencapai 1.398 jiwa per kilometer persegi, dengan luas wilayah 473.481 km². Pulau Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebesar 20,7 juta jiwa, yang terdiri dari 10,3 juta jiwa perempuan dan 10,4 juta jiwa laki-laki. Kepadatan penduduk di Sulawesi tercatat sebesar 702 jiwa per kilometer persegi, dengan luas wilayah 174.416 km². Dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di ketiga pulau tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Tenaga kerja merupakan penggerak utama pembangunan karena memiliki peran dalam mengelola dan mengoptimalkan faktor-faktor produksi lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Hidayat et al., 2017). Tenaga kerja dalam hal ini merujuk pada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja secara mandiri maupun berkelompok dengan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja antar pulau di Indonesia berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah kembali)

Gambar 1. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin antar Pulau di Indonesia Tahun 2024 (persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas setiap pulau memiliki jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang lebih banyak dibanding tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Perbandingan rata-rata TPAK perempuan dan TPAK laki-laki di pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi yaitu 1:1,53. Hal ini memberikan arti bahwa masih adanya ketimpangan antara TPAK perempuan dan TPAK laki-laki, jika dilihat dari jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di ketiga pulau tersebut relatif sama ditunjukkan dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam gambar 1.1 namun dalam sisi lain tingkat partisipasi perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Melihat masih adanya masalah pada TPAK perempuan di Indonesia seperti ketimpangan gender dalam dunia ketenagakerjaan yang dipengaruhi dua hal yakni institusi pemberi kerja dan sosial budaya. Institusi pemberi kerja masih memandang bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Sedangkan dari sisi sosial budaya, kesenjangan terjadi akibat kultur patriarki yang masih dianut, sehingga perempuan lebih banyak berperan dalam pekerjaan domestik (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Sebagaimana dalam *Social Role Theory*, yang menyatakan bahwa perempuan secara sosial berperan sebagai pengasuh anak, pengelola rumah tangga, dan pendukung peran suami.

Konsep gender lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan dengan laki-laki

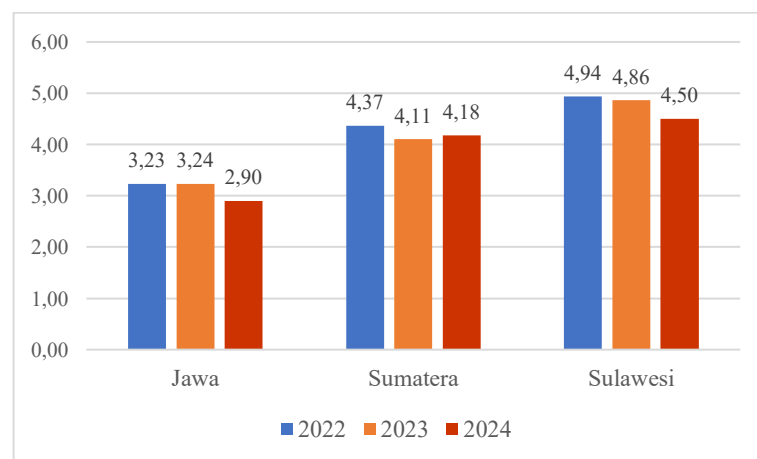
dan hal ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya konstruksi budaya (Kartika, 2017). Budaya dan norma yang berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerja perempuan lebih banyak dipekerjakan di sektor domestik dibandingkan di sektor publik, meskipun setiap perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih menjalani peran di sektor domestik maupun di sektor publik (KPPPA, 2019).

Peran serta perempuan dalam pembangunan sangat diperhatikan terutama dalam pembangunan keluarga, karena perempuan memiliki peran ganda yaitu mengabdikan diri untuk keluarga, dan berperan serta dalam pembangunan. Namun, pekerja perempuan dihadapkan pada kenyataan bahwa produktivitas dalam berpartisipasi di luar rumah dibatasi oleh faktor domestik. Keterlibatan ibu rumah tangga dalam mencari nafkah menentukan besar kecilnya pendapatan keluarga, yang berarti pula menentukan *standard of living*, status sosial ekonomi serta tingkat hidup dari keluarganya. Peranan perempuan dalam rumah tangga diukur atau dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan keluarga (Gasparini & Marchionni, 2015).

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi maupun faktor demografi. Beberapa faktor demografi yang dianggap penting pengaruhnya adalah usia, pendidikan dan status pernikahan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada umumnya banyak dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga angkatan kerja perempuan turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat (Rini,

2002). Menurut Mujahid (2013) efisiensi dan pemerataan dalam perekonomian dapat ditingkatkan dengan melibatkan perempuan. Pasokan tenaga kerja perempuan sangat penting bagi kemajuan dan pembangunan sosial-ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Namun dalam pembangunan ekonomi tidak menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator tunggal dan memusatkan perhatian pada kualitas proses pembangunan (Sarlia & Hanum, 2019). Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya semakin makmur daerah tersebut (Mahendra, 2016). Perkembangan Laju PDRB Perkapita di 3 Pulau yang ada di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Laju PDRB Per kapita di 3 Pulau Indonesia Tahun 2022-2024 (persen)

Dari gambar 1.3 laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita digunakan yang digunakan sebagai indikator penting untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000). PDRB per

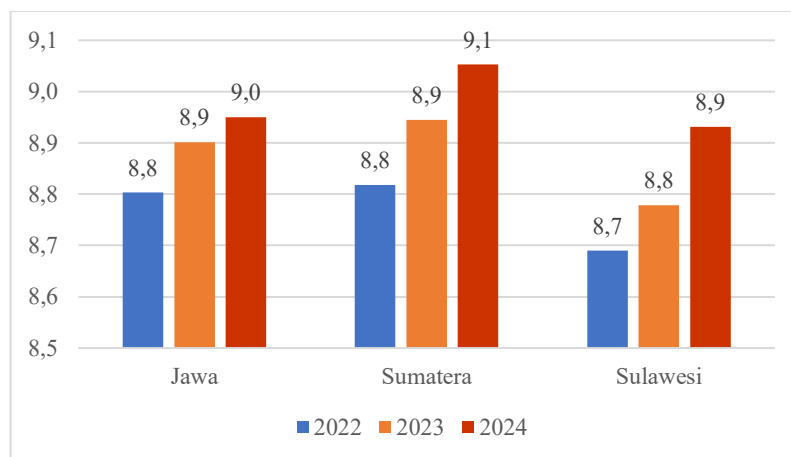
kapita mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa, serta dapat menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi secara umum. Berdasarkan data, Pulau Sulawesi tercatat memiliki rata-rata PDRB per kapita tertinggi dibandingkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu sebesar 4,50 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif signifikan dibanding dua pulau lainnya, yang secara potensial dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Tingginya pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan menurunnya aktivitas ekonomi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya partisipasi angkatan kerja.

Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun juga berdampak langsung pada naiknya pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan per kapita yang lebih tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi ini umumnya diawali dari pemenuhan kebutuhan pokok atau primer seperti pangan, sandang, dan papan, sebelum masyarakat mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, transportasi, tabungan, investasi, serta hiburan (Sarlia & Hanum, 2019).

Selain faktor PDRB terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi TPAK perempuan diantaranya pendidikan. Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih baik. Dengan demikian pendidikan merupakan syarat yang penting dalam meningkatkan

produktivitas kerja. Tanpa bekal pendidikan mustahil orang akan mudah dalam mempelajari hal-hal yang bersifat baru (Bonerri et al., 2018).

Perkembangan pengetahuan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan lamanya menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Semakin banyak penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik (Bonerri et al., 2018). Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah berbaaur dalam lingkungan pekerjaan, dan untuk tingkat pendidikan yang ada di pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi dapat dilihat dalam bentuk rata-rata lama sekolah perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 4 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di 3 Pulau Indonesia Tahun 2022-2024 (tahun)

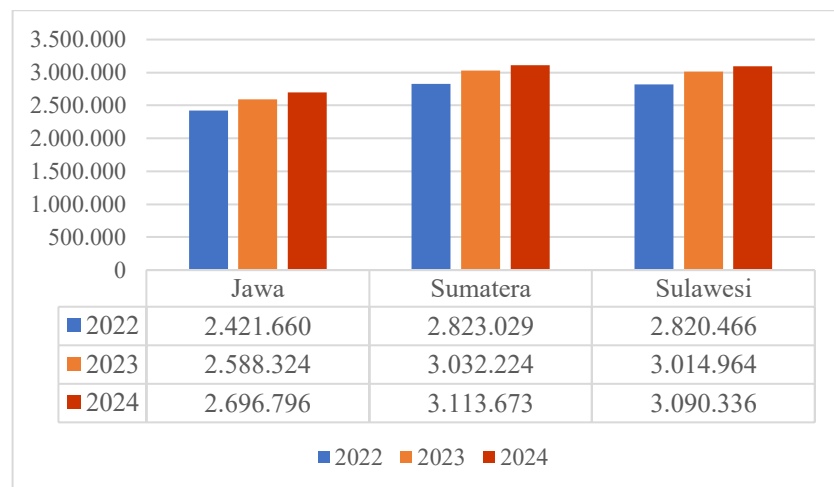
Pada gambar 1.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Peningkatan RLS perempuan ini mencerminkan membaiknya tingkat pendidikan perempuan, yang berkontribusi terhadap perluasan peluang kerja dan peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja.

Menurut Palaz et al. (2001), pendidikan memegang peranan penting sebagai elemen pembentuk struktur sosial, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan individu secara afektif maupun kognitif.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi faktor yang berkontribusi dalam menciptakan SDM yang berkualitas karena tujuan pendidikan nasional adalah untuk membantu anak-anak meraih potensi penuh mereka sehingga mereka mampu berkembang menjadi warga negara yang terhormat, sehat, cerdas, kompeten, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab (Syairoji et al., 2024). Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Menurut Boserup (1984) pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seorang wanita. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap jasa-jasanya di pasar tenaga kerja. Dampak pendidikan sangat besar terhadap wanita, karena pendidikan akan merubah nasib wanita menjadi jauh lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, baik dari segi upah maupun kondisi kerja. Pendidikan juga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam dunia kerja.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah upah. Sistem pengupahan dalam suatu perusahaan berperan penting dalam mendorong produktivitas tenaga kerja agar lebih optimal. Besarnya upah yang diterima tenaga kerja umumnya ditentukan oleh tingkat produktivitas

yang mereka hasilkan. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan melalui proses yang cukup panjang setiap tahunnya dan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ekonomi serta sosial. Tingkat upah memiliki pengaruh terhadap keputusan individu untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, maka semakin besar pula dorongan bagi masyarakat untuk bekerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Rata-rata perkembangan upah minimum provinsi di tiga pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah kembali)

Gambar 1. 5 Upah Minimum Provinsi 3 Pulau di Indonesia Tahun 2022-2024 (rupiah)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa upah minimum provinsi (UMP) di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penetapan UMP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan besaran yang didasarkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Sarsi et al., 2014). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan UMP di daerah-daerah Pulau Jawa cenderung lebih rendah dibanding wilayah lain. Hal ini disebabkan oleh dasar perhitungan yang digunakan, yaitu upah minimum tahun sebelumnya, sesuai

dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Selain itu, tingkat KHL di Jawa secara umum juga lebih rendah, sehingga mempengaruhi besaran UMP. Di Indonesia, kebijakan pengupahan diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap (Sulistiawati, 2012).

Upah yang akan diterima oleh para tenaga kerja bergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa berkaitan erat antara kenaikan upah para pekerja dengan kenaikan produktivitas. Upah minimum provinsi menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Upah yang lebih tinggi dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar kerja, terutama di sektor informal (Haryanti, 2022).

Dr. Wessels berpendapat bahwa cara terbaik untuk memperkirakan dampak upah minimum terhadap nilai keberadaan di pasar tenaga kerja adalah dengan memeriksa dampaknya terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut Wessels (2001) perubahan upah minimum dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran peserta angkatan kerja. Dampak utama upah minimum adalah melalui sisi permintaan. Jika dampak sisi penawaran terjadi, dampak tersebut cenderung mengurangi penawaran peserta angkatan kerja melalui peningkatan pendapatan anggota keluarga lainnya (dampak pendapatan), peningkatan potensi pendapatan

seumur hidup dari pekerjaan (dampak kekayaan), peningkatan nilai pekerjaan di masa mendatang relatif terhadap pekerjaan saat ini (dampak upah relatif).

Menurut *labor-leisure theory*, partisipasi tenaga kerja mempertimbangkan upah pasar yang ditawarkan serta nilai yang didapatkan jika seseorang memilih untuk menggunakan waktu luangnya. Bagi tenaga kerja wanita, keputusan ini melibatkan perbandingan antara upah yang diterima dan nilai waktu yang digunakan untuk mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan dan upah yang layak dapat mendorong lebih banyak wanita untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja (Ariansyah et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di 3 Pulau Indonesia Tahun 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum partisipasi angkatan kerja perempuan di 3 Pulau Indonesia tahun 2020-2024 dengan mengidentifikasi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam mempengaruhi TPAK perempuan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto per kapita, rata-rata lama sekolah perempuan dan upah minimum provinsi secara parsial terhadap tingkat

partisipasi angkatan kerja perempuan di tiga Pulau Indonesia (pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi) tahun 2020-2024?

2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto per kapita, rata-rata lama sekolah perempuan dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di tiga Pulau Indonesia (pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi) tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto per kapita, rata-rata lama sekolah perempuan dan upah minimum provinsi secara parsial terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di tiga Pulau Indonesia (pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi) tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto per kapita, rata-rata lama sekolah perempuan dan upah minimum provinsi secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di tiga Pulau Indonesia (pulau Jawa, pulau Sumatera dan pulau Sulawesi) tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga literatur mengenai pengaruh produk domestik regional bruto per kapita, rata-rata

lama sekolah perempuan dan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, serta dapat menjadi bahan masukan agar peneliti selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang didapat selama perkuliahan, khususnya mengenai pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah perempuan, dan upah minimum provinsi dalam mempengaruhi TPAK perempuan.
2. Manfaat bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan untuk pertimbangan pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini digunakan sebagai dasar atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi lain untuk melakukan studi lanjutan yang lebih mendalam, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga pulau yang ada di Indonesia yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi pada tahun 2020-2024 dengan sumber data melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

